

**EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

**Nama : NURUL SOFYAN BADHAR
NIM : C 100010080
NIRM : 01. 6. 106. 01000. 5. 0080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkup, maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharu.

Efektifitas peraturan ini dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu.

Hukum sering kali dipandang sebagai gejala sosial yang sangat rumit. Semula pandangan-pandangan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang awam akan hukum, dalam arti tidak pernah mengalami pendidikan hukum. Namun kadang-kadang hanya mengetahuinya kalau telah terjadi suatu pelanggaran.¹

Berdasarkan teori, ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan

¹ Sordjono Soekamto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV. Remadja Karya, hal. 1.

peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu menjadi salah satu ruang lingkup studi tentang hukum secara ilmiah yang mempelajari sejauh mana pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:²

1. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mempergunakan hukum?
2. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah timbul reaksi terhadap hukum?
3. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menentang hukum?
4. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menyalahgunakan hukum?
5. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mengacuhkan hukum?

Dengan demikian suatu hukum akan dianggap efektif, apabila sikap atau tindak perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain mematuhi hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana

² *Ibid*, hal. 3.

setiap warga negara hidup layak, bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan dan bebas ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang perorangan, keluarga, golongan dan masyarakat, dimana pembangunan bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat saja, akan tetapi semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun anak-anak.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, dimana diperlukan pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang dapat meningkatkan perilaku agar tidak melanggar norma-norma. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hal-hal yang bisa merusak dan membentuk kepribadian anak untuk menuju hal-hal yang bisa melanggar norma-norma, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan yang dilakukan terhadap anak selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara. Bilamana diperlukan, maka kewajiban mengasuh dan membimbing dilakukan oleh negara sendiri. Orang tua, wali, LSM serta pemerintah berkewajiban mengasuh dan membimbing dan melindungi anak dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Dimana dengan adanya implementasi terhadap perlindungan anak tersebut, maka akan mengusahakan kesejahteraan terhadap anak. Kesejahteraan yang di dapat anak tersebut dapat berupa penghidupan yang layak, dan mental yang baik, sehingga akan mencegah anak untuk berbuat hal-hal yang bisa

mengakibatkan kerugian terhadap anak tersebut ataupun terhadap orang lain. Untuk lebih mewujudkan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah sebagai badan eksekutif dan DPR sebagai badan legislatif menetapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan terhadap anak terdiri dari beberapa hal, antara lain:⁴

1. Pengayoman yaitu bahwa anak merasa nyaman dan aman dalam perlindungan tersebut.
2. Usaha bersama yaitu bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung-jawab bersama.
3. Kepentingan bersama yaitu bahwa perlindungan terhadap anak dapat berakibat melindungi terhadap diri sendiri.
4. Luas lingkup perlindungan yaitu perlindungan terhadap kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Perlindungan mengandung unsur edukatif yaitu bahwa perlindungan bersifat membangun.

³ Undang-Undang Perlindungan Anak, 2002, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.

⁴ Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4-6

6. Perlindungan penimbunan korban dalam pemberian perlindungan yaitu pencegahan terhadap yang dilindungi menjadi korban dari pihak yang melindungi.

Apabila kita melihat uraian di atas, maka secara naluriah kita akan berfikir bahwa masa depan anak benar-benar telah mendapatkan perlindungan. Akan tetapi bila kita melihat data di bawah ini yang dihimpun oleh Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) tahun 2003, bahwa permasalahan anak yang sering didapati antara lain: Kasus anak jalanan (376 anak), buruh anak (645 anak), kenakalan remaja (120 anak), anak yang dilacurkan (54 anak), anak korban kekerasan (28 anak).⁵

Berkaitan dengan hasil data yang diuraikan di atas, maka dapat kita lihat bahwa perlindungan terhadap anak yang berupa jaminan dan perlindungan terhadap anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang pengertian perlindungan anak belum terealisasi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengangkat permasalahan tentang realisasi Pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul: **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM**

⁵ Henggianto Adi Nugroho, 2006, *Skripsi Pelaksanaan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Komisi Independen Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta*, Surakarta: Fak. Hukum UMS, hal. 3.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakkan Undnag-Undang Perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- b) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakkan Undnag-Undang Perlindungan anak.

2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan Perlindungan Anak dan efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- b) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam hukum pidana dan hukum pidana anak, khususnya mengenai efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam melindungi anak dari kekerasan.
- c) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang efektivitas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.
- b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Anak dan umumnya Hukum Pidana..

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya dalam bahwa perlindungan anak terhadap kekerasan sangat diperlukan untuk anak itu sendiri yang dapat berupa pembentukan kejiwaan dari anak.

E. Landasan Teoritis

Batas usia anak, dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tentang Peradilan Anak, yang menyatakan: *“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”*.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut.⁶

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur manusia.

Dengan demikian, apabila kaidah dan sikap tindak laku manusia dapat diatur dengan benar, maka tujuan dari pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak telah terimplikasikan.

⁶ Arif Gosita, *Op. Cit.* hal. 28.

Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu peraturan, tidak hanya sebatas telah memenuhi tujuan pembuatan peraturan tersebut, akan tetapi juga dipertimbangkan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Efektifitas suatu peraturan ini diukur dengan masalah sanksi yaitu mengenai tepat/tidak penerapan hukuman; pemahaman masyarakat yaitu dapat diterima atau tidaknya dan dipatuhi peraturan tersebut dimasyarakat serta tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris kuantitatif, dimana penulis meneliti data primer di lapangan dan data sekunder. Yuridis akan mengungkapkan dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana terhadap anak disertai dengan sampel kasus tentang tindak pidana terhadap anak, sedangkan

empiris adalah mendiskripsikan mengenai efektivitas dari peraturan hukum tersebut dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan dengan penelitian untuk mendapatkan suatu data yang mencakup:

- Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:
- Pengetahuan masyarakat tentang isi Undang-Undang perlindungan Anak.
- Pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana terhadap anak.
- Pengetahuan masyarakat tentang hukum.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian ini adalah di kota Surakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut: lokasi penelitian merupakan domisili dari peneliti dan dengan demikian maka akan menghemat biaya serta waktu.

3. Jenis data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan sumber data, sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai efektivitas dari Undang-Undang No. 23 Perlindungan Anak terhadap kekerasan terhadap anak di kota Surakarta.

b. Sumber Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶ Data yang telah diperoleh dikumpulkan dengan melakukan penulisan dan didukung dengan peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terhadap anak, dilengkapi dengan kasus tindak pidana terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

⁷ S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 113.

ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, melakukan hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup juga metode-metode deskriptif.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab Pertama mengenai Pendahuluan dari proposal penelitian ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab dua berisikan Tinjauan Pustaka, yang akan diuraikan tentang Tinjauan Umum Efektivitas, yang meliputi pengertian efektivitas dan konsep efektivitas. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Anak meliputi pengertian anak dan batasan umur anak, hak-hak anak, anak sebagai korban tindak pidana. Tinjauan Umum Tentang kebijaksanaan kriminal meliputi pengertian kebijaksanaan kriminal dan ruang lingkup kebijaksanaan kriminal.

Bab tiga berisikan mengenai Hasil Pembahasan dari Penelitian yang antara lain: Pertama, Implementasi pelaksanaan perlindungan anak menurut UU No. 23 tahun 2002, sehingga apabila telah diketahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak tersebut, maka akan diketahui efektivitas UU No. 23 tahun 2002 dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Kedua, Hambatan-hambatan apa saja yang mengganggu terjadinya perlindungan anak terhadap kekerasan menurut UU No. 23 tahun 2002, dan bagaimana cara mengatasinya.

Bab keempat merupakan Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran penulisan hukum yang bermanfaat bagi perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardino. *Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah*. FH UMS. Surakarta. 2004.
- Henggianto Adi Nugroho. *Skripsi Pelaksanaan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Komisi Independen Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta*. Fak. Hukum UMS. Surakarta. 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1986.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT. Buana Aksara. Jakarta. 2001.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.